

## ABSTRAK

**Dovi Prashauman Oktriza , 1223030030, 2026, “IMPLIKASI INPRES NO. 1 TAHUN 2025 TENTANG EFISIENSI ANGGARAN TERHADAP RANPERDA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI KASUS DI KOTA SOLOK)”**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan implikasinya terhadap proses legislasi daerah, khususnya dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Kota Solok. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana proses legislasi Ranperda SOTK di Kota Solok, bagaimana implikasi Inpres tersebut terhadap kebijakan daerah, serta bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap fenomena tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui proses legislasi Ranperda tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Kota Solok, 2) Mengetahui implikasi Inpres No. 1 Tahun 2025 terhadap Ranperda SOTK Kota Solok, 3) Mengetahui tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap kebijakan efisiensi anggaran dan dinamika legislasi Ranperda SOTK di Kota Solok.

Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir teori desentralisasi, teori teori *good governance*, dan teori siyasah dusturiyah,

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif antara norma hukum dan realitas empiris di lapangan. Teknik analisis data melalui tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Proses legislasi Ranperda SOTK di Kota Solok telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan. 2) Hasil wawancara menunjukkan bahwa Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tidak berimplikasi langsung terhadap proses legislasi, melainkan memberikan pengaruh tidak langsung sebagai bagian dari lingkungan kebijakan yang mendorong rasionalisasi anggaran, pengurangan belanja non-prioritas, serta penguatan orientasi kinerja dalam penyusunan struktur organisasi. 3) Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kebijakan efisiensi anggaran dan penataan SOTK sejalan dengan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan amanah, meskipun implementasinya tetap memerlukan perhatian terhadap aspek pemerataan pelayanan publik dan akuntabilitas.

**Kata Kunci:** Efisiensi Anggaran, Siyasah Dusturiyah, SOTK.